

Daftar Pustaka

Buku dan Literatur

- Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)**, PT Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2000.
- Andi Hamzah, **Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia**, Yarsif Watampone, Jakarta, 2003.
- Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Bambang Sunggona, **Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Boedi Harsono, **PPAT Sejarah Tugas dan Kewenangannya**, Penerbit Kencana, Jakarta, 2011.
- Ishaq, 2009, **Dasar-dasar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Komariah, 2013, **Hukum Perdata Edisi Revisi**, UMM Press, Malang.
- Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, **Hukum Sebagai Suatu Sistem**, Remaja Rusdakarya, Bandung, 2003.
- Margono S, **Metodologi Penelitian Pendidikan**, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- N.G. Yudara, **Kedudukan Akta PPAT Sebagai Alat Bukti Tertulis Yang Otentik**, Universitas Indonesia, Jakarta , 2000.
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum Cetakan ke-2**, Penerbit Kencana, Jakarta, 2008.

- R. Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Riduan Syahrani, **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum**, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Salim HS, 2011, **Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)**, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soedjono Dirjosisworo, **Pengantar Ilmu Hukum**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1984.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Sri Winarsi, **Pengaturan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Pejabat Umum**, Universitas Airlangga, Surabaya, 2002.
- Subekti, 2003, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, PT Intermasa, Jakarta.
- Subrata dan Kubung, 2014, **Kamus Hukum Internasional dan Indonesia**, Permata Press, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, **Bab-Bab tentang Penemuan Hukum**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Urip Santos, **Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah**, Penerbit Kencana, Jakarta, 2011.
- Van Apeldoorn, **Pengantar Ilmu Hukum**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.
- Yandianto, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, CV. M2S, Bandung, 2000.

Karya Tulis Ilmiah

Paulus Effendi Lotulung, **Pengertian Pejabat Tata Usaha Negara Dikaitkan Dengan Fungsi PPAT Menurut PP No 10 Tahun 1961**, Universitas Surabaya, Surabaya, 1966.

Reza Febriantina, **Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Otentik**, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang

Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Internet

Hendra Budiman, **Memaknai Perbuatan Tercela Sebagai Dasar Pemakzulan Presiden** (*Online*), [http://www.calonsh.com /2016/10/15/memaknai-perbuatan-tercela-sebagai-dasar-pemakzulan-presiden](http://www.calonsh.com/2016/10/15/memaknai-perbuatan-tercela-sebagai-dasar-pemakzulan-presiden).